

SKRIPSI

***E-GOVERNMENT* DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

**E-GOVERNMENT DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar



10/09/2021
1 exp
Sumbangan Alumni
R/0193/ADN/24 CD
FIR
e'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Nama Mahasiswa : Firkawati
Nomor Induk Mahasiwa : 105611115616
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM : 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0203/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.

TIM PENILAI

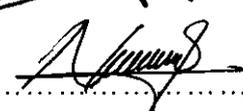
Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (.....)
2. Dr. Muh. Yahya, M.Si (.....)
3. Dr. Hafis Elfiansyah Parawu, ST., M.Si (.....)
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firkawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1115616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Firkawati

ABSTRAK

Firkawati, Mappamiring dan Nasrul Haq, *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.

e-government merupakan bentuk penerapan pelayanan public yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai media informasi serta sarana komunikasi interaktif antar pemerintah dan para SKPD maupun komunikasi interaktif antar masyarakat. Penerapan *e-government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana berupa penyediaan data dan informasi berbasis *electronic* tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai bentuk transparansi dalam melaksanakan pelayanan public. Pemerintah Kabupaten Pangkep menghadirkan aplikasi Litbang Pangkep sebagai wadah bagi masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau atau memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public dengan menerapkan pelayanan public berbasis *online* yang didukung dengan adanya aplikasi perangkat modern. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangkep dapat dilayani dengan baik, mudah dan efektif. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep saat ini tidak terlaksana karena masa aktif layanan hosting telah habis.

Kata Kunci: *E-Government*, Aplikasi Litbang Pangkep.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah RabbilAlamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Serta salam dan shalawat kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya agar agama islam dapat sampai kepada kita ummatnya sebagai petunjuk hidup bagi kita semua untuk kembali kepada Allah SWT kelak. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wadah untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir, adapun judul dari skripsi ini adalah “E-Government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep”.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Departemen Ilmu Administrasi Negara. Selain itu rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis tujukan kepada kedua orang tua, yaitu buat Bapak Muhammad Amir B dan Bondeng, yang senantiasa sangat tulus memberikan kasih sayangnya, dukungan moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan serta doa Bapak dan Mama selama ini. Maaf kalau penulis banyak merepotkan Bapak dan Mama, semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan buat Bapak dan Mama. Buat Saudara-saudari terhebat, Ibnu Mas'ud, Sumiaty, Defiah Andriana Siama, serta teman-teman semuanya. Terima Kasih atas doa dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini, dan telah menjadi penyemangat

yang terbaik. Serta untuk adik-adikku Putri Kheiran Azzahra, Azzahra Fidris Siam, Al Kahfi Fidris Siam, Al Arsy Fidris Siam, dan Arsyila Fidris Siam kasih atas canda tawa yang diberikan oleh kalian kepada Aunty. Terima kasih kepada Muliana sepupu yang tangguh dan selalu menemani penulis selama penelitian, serta sahabat terbaik sejak kecil Sahriani yang selalu dengan tulus mendoakan dan memberikan support terbaik. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat merampungkan penulisan skripsi ini, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Bapak Dr. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai pada dengan tahap penyelesaian studi.
5. Semua pihak di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kedua orang tua saya yang terkasih, ayahanda Muhammad Amir B dan Ibu saya Bondeng yang tak kenal lelah mendoakan dan mengusahakan pundi-pundi biaya bagi anak-anaknya selama menapaki perkuliahan.
7. Saudara-saudari saya Ibnu Mas'ud, Sumiaty, Defiah Andriana Siana, dan Muhammad Fidris Isra yang telah mengambil peran pemenuhan kebutuhan-kebutuhan selama menyusun skripsi serta menjadi support system dalam menyelesaikan studi.
8. Sepupu saya Muliana, S.Psi yang tak kenal cuaca hujan ataupun panas tetap setia menemani saya pulang pergi ke Instansi untuk melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Sahabat kecil Sahriani, S.kom yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi tak kala sedang merasa futur.

10. Kepada teman seperjuangan saya Magfirah, Asnawi Abdullah, dan Inriani yang senantiasa menemani dari awal penulisan proposal hingga penyusunan skripsi, terimakasih atas dukungan dan support. Dan untuk teman-teman federasi 2016 terkhusus kelas D terimakasih atas kesan-kesan selama proses perkuliahan.

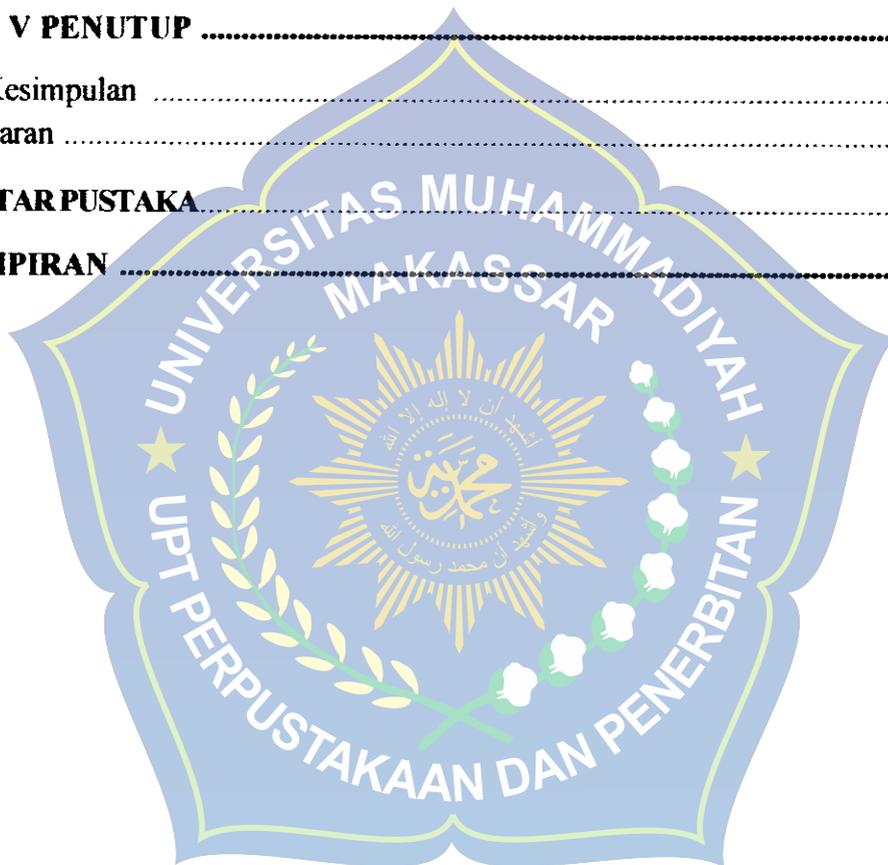
Demi kesempurnaan skripsi ini kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga dengan penulisan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep dan Teori <i>E-government</i>	10
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Fokus Penelitian	38
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Pengabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep	51
B. Hasil Penelitian	67
C. Pembahasan Penelitian	
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	45
Tabel 1.2	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	34
Gambar 2. Struktur Organisasi	54
Gambar 3. Tampilan <i>Website</i> Balitbangda	73
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Litbang Pangkep di Playstore	74
Gambar 5. Tampilan Aplikasi Litbang Pangkep	74
Gambar 6. Tampilan Fitur Aplikasi Setelah di Buka	75
Gambar 7. Hasil Pelacakan <i>Internet Hacking</i>	75
Gambar 8. Akar Masalah Pelacakan Aplikasi	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital saat ini berkembang kian pesat dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dan telah menawarkan solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten pangkep melahirkan sebuah inovasi baru, yaitu inovasi aplikasi Litbang Pangkep. Aplikasi Litbang Pangkep merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pangkep dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aduan maupun saran. Kehadiran aplikasi Litbang Pangkep ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat kabupaten pangkep agar lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi di dalamnya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public pada semua aspek dengan cara menyampaikan aduan mengenai kurang baik atau baiknya kualitas pelayanan oleh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Aplikasi Litbang Pangkep ini juga dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau saran-saran inovasi yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan oleh Balitbangda Pangkep sebagai bahan penelitian. (Litbang Pangkep.com).

Dalam era otonomi daerah istilah *e-government* ini semakin populer, dan sudah banyak provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di Indonesia yang

menerapkan pelayanan berbasis *e-government* dalam urusan lembaga pemerintahan. Daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas, sumber daya manusia yang sedikit, dan jumlah penduduk yang banyak sangat dianjurkan untuk mengembangkan *e-government* tersebut. Dengan kondisi geografis yang demikian maka perlu adanya pengembangan teknologi digital dalam mengelolah pemerintahan dan pembangunan yang belum maksimal yang disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas, serta transportasi dan komunikasi yang sering menjadi hambatan. Maka dengan hadirnya teknologi digital pemerintah diyakini mampu memaksimalkan pengelolaan pembangunan pemerintahan yang selama ini belum maksimal.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antar masyarakat, dunia pemerintahan, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit:2006). *E-Government* merupakan kependekan dari *Eletronic Government*, *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik pemerintah yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan lain sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-government* juga merupakan bentuk implementasi pelayanan public melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan

efisien, layanan yang lebih baik dan nyaman, mencakup jangkauan yang lebih luas, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Bentuk layanan sederhana yang lain dari penggunaam layanan *e-government* adalah sebagai sarana komunikasi dan informasi baik internal di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komunikasi informasi interaktif dengan masyarakat melalui media saran dan aduan yang telah disediakan oleh pemerintah didalam aplikasi Litbang Pangkep tersebut. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sangat besar untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah semakin berkembang inisiatif pemerintah adalah suatu keharusan untuk menjadi seorang yang inovatif dalam mengintegrasikan jaringan teknologi di segala bidang yang semakin maningkat. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam memberikan kewajiban kepada setiap setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, yang efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan *e-*

government oleh Balitbangda Pangkep merupakan bentuk kepedulian Balitbangda Pangkep dalam mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*. Keberhasilan penerapan *e-government* tidak terlepas dari beberapa sumber daya untuk mengembangkan *e-government* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Rianto dan Tri Lestari terdapat beberapa sumber daya untuk mewujudkan *e-government*. Sumber daya tersebut antara lain - *software, hardware, human resources, data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana*. Beberapa komponen atau sumber daya tersebut sangat menunjang akan keberhasilan dalam penerapan *e-government*. Oleh karena itu sangat penting bagi instansi pelaksana *e-government* untuk memperhatikan hal tersebut.

Menurut intruksi presiden nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan strategi dan tujuan pengembangan *e-government* mengemukakan bahwa, pengembangan *e-government* adalah suatu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka mengembangkan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Negara menjadi citra buruk pemerintah di mata masyarakat. Bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sering dijumpai pada setiap daerah maupun kota. Berbagai macam permasalahan mengenai pelayanan publik, seperti pelayanan perizinan, permasalahan pembangunan, masih sering terjadi dilingkungan wilayah Kabupaten Pangkep. Seiring dengan hal tersebut masyarakat juga kesulitan dalam hal penyampaian pengaduan atau

pengaduan yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi yang telah dirancang langsung oleh Balitangda Pangkep. Jika Liputo dalam lokus penelitiannya hanya mencakup tingkatan kelurahan, maka cakupan lokus pada penelitian ini lebih luas karena menganalisis penerapan *e-government* di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena aplikasi Litbang Pangkep merupakan aplikasi yang baru diterapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Dengan menerapkan pelayanan berbasis *e-government* dan didukung dengan perangkat aplikasi. Kepentingan warga masyarakat kabupaten pangkep akan dilayani dengan baik dengan cara yang mudah dan efektif. Aplikasi Litbang Pangkep launching pada tanggal 15 juli 2019 dan mendapat pujian serta apresiasi dari ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin (TribunPangkep.com). Aplikasi Litbang Pangkep telah beroperasi selama satu tahun lebih, namun masalah selanjutnya ialah kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Pangkep yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta sama sekali tidak mengetahui keberadaan program pelayanan berbasis aplikasi tersebut, ditunjukkan dengan jumlah install aplikasi di playstore yang masih sekitaran 50+. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai sumber daya yang di butuhkan dan digunakan dalam penerapan aplikasi litbang pangkep. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan cara mengoperasikan aplikasi Litbang Pangkep sehingga menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme dan alur kerja serta kegunaan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi dan

mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi Litbang Pangkep. Penelitian ini juga menawarkan solusi saat penelitian ini berhasil untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Balitbangda Pangkep selaku pengelola aplikasi dengan mengangkat judul **“E-Government Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan adalah bagaimana E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pokok masalah yang diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Dan sebagai bahan masukan bagi Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Balitbangda untuk meningkatkan inovasi ini.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk merumuskan *e-government* di Balitbangda dan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan inovasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya laksanakan, adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhasil di kumpulkan antara lain:

1. Nurul Wahida Safitri (2016) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wahida Safitri dengan judul penelitian “Penerapan *E-Government* di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang” bahwa penerapan *e-government* di pusat pelayanan informasi dan pengaduan di Kabupaten Pinrang sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, masyarakat cukup merasa puas dengan adanya penerapan *e-government* ini karena lebih mudah di akses dan lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan yang manual. Namun penerapan *e-government* di pusat pelayanan informasi dan pengaduan Kabupaten Pinrang mengalami beberapa hambatan yaitu factor jaringan dan sosialisasi. Jaringan internet yang kurang bagus menyebabkan *website* PINDU kadang non aktif, serta factor lainnya adalah tahap sosialisasi yang kurang maksimal tentang hadirnya PINDU tersebut.
2. Muhammad Zulfadli HM (2019) dengan judul “Inovasi Pelayanan Berbasis *Smart City* Di Kota Makassar”. Selama penerapan *smart city* ini pemerintah sudah melakukan beberapa inovasi dalam mewujudkan Makassar *smart city* misalnya, *operation room* melalui CCTV yang

digunakan sebagai pusat informasi dan pemantauan, apartement lorong (aparong), Makassar *home care* atau yang lebih dikenal dengan istilah Dottoro'ta, tangkasa'ki, dan lorong garden.

3. Nur Hikmah (2020) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah dengan judul penelitian “Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik di Kota Makassar”. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa dengan adanya terminal parkir elektronik (TPE) masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk parkir di bahu jalan dan tidak lagi merasa khawatir kendaraannya di gembok, karena dengan adanya terminal parkir elektronik yang dipasang di bahu jalan maka parkir di bahu jalan sudah resmi dan bukan lagi parkir liar. Adanya TPE ini masyarakat masih saja ada yang complain atau tidak setuju mengenai penerapan TPE tersebut sehingga membuatnya masih belum maksimal.
4. Widodo Agus Setiaonto (2016) Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo Agus Setiaonto dengan judul “Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya”. Inovasi *e-health* merupakan layanan yang dapat memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adanya inovasi *e-health* tersebut pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelum adanya inovasi *e-health*. Layanan *e-health* dapat diakses melalui *website* maupun pada aplikasi yang dapat di unduh di *playstore*. Layanan *e-health* sangat memberikan manfaat bagi pasien dalam melakukan antrian tanpa harus datang ke lokasi, memudahkan pasien untuk melakukan rujukan, serta memudahkan dalam

hal pendataan pasien yang telah terekam dalam big data yang telah terintegrasi.

5. Haura Attahara (2013) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis e-Government (Studi kasus aplikasi ogan lopian dinas komunikasi dan informatika di kabupaten perwakarta)”. Aplikasi Ogan Lopian yang diluncurkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta masih membutuhkan pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia sebagai pengelolah yang dapat menunjang keberhasilan e-government tersebut. Terlepas dari berbagai kekurangan pada penerapan e-government aplikasi Ogan Lopian tersebut dapat dijadikan contoh bagi pemda-pemda lain yang ingin melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya.

B. Konsep dan Teori E-Government

1. Konsep *Electronic Government*

Eko Indrajit (2016) mengemukakan sejarah perkembangan *e-government* terdapat tiga aspek pemicu (*drivers*) utama berkembangnya *e-government* yaitu:

- a. Era globalisasi yang berkembang begitu cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi, hokum, korupsi, perdagangan bebas, perdagangan terbuka dan yang lain sebagainya menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tersebut tidak ingin di asingkan dari

dunia. Dalam format tersebut, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah Negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana menposisikan masyarakat dan negaranya dalam sebuah pergaulan global. Jika sebelumnya sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (*supply side*) maka saat ini telah bergeser pada sisi ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat Negara lain, maka masyarakat dari suatu Negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal tersebut adalah tanggungjawab pemerintah.

- b. Kemajuan teknologi dan informasi berkembang sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebar dengan sangat cepat pada kalangan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Tentu saja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa modern harus bersikap kepada masyarakat, karena banyaknya aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakat itu sendiri, misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya dikarenakan adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah

dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisi peranannya.

- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak dapat terlepas dari semakin membaiknya kinerja industry swasta dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Hubungan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dsb) telah membentuk sebuah standart pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan penikatan kinerja dari sector swasta tidak diikuti dengan percepatan yang sama dengan dalam sector public, sehingga masyarakat dapat melihat kepincangan dalam pemberian kualitas pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat atas pemerintah agar meningkatkan kualitas kerjanya, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan rakyat, masyarakat tidak segang-segang untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau alur lainnya.

Ketiga aspek diatas yang menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar pemerintah lebih meningkatkan kerjanya secara signifikan dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Misalnya, pada Negara Inggris yang melihat perkawinan antara pemerintah dan teknologi yang kemudian akan melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai *Electronic Service Delivery (ESD)*, yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital pemerintah dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dari ESD inilah yang kemudian

berkembang menjadi cikal bakal dari *e-government*, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarakat umum, kalangan industry dan sector public lainnya.

2. Teori-Teori *E-government*

Electronic government adalah sebuah proses system pemerintahan dengan menggunakan ICT (*information, communication, and technology*) sebagai alat untuk mempermudah proses komunikasi dan transaksi pada masyarakat, lembaga pemerintahan beserta stafnya. Sehingga mencapai efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat. *E-government* adalah singkatan dari *Electronic Government*, atau disebut juga *E-Gov*. *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Menurut Indrajit (2006:38), *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antar masyarakat, dunia pemerintahan, dan pihak yang berkepentingan. Konsep *e-government* di deskripsikan bermacam-macam oleh berbagai individu maupun kelompok.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pendapat di bawah ini tentang *e-government* dalam berbagai sudut pandang system pemerintahan luar dan dalam negeri antara lain:

- a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan bahwa *e-government* mengacu pada penyampaian informasi serta pelayanan pemerintah berbasis online atau media digital lainnya.
- b. Pemerintah New Selandia mengemukakan bahwa *e-government* adalah sebuah ide pemerintah menggunakan sebuah teknologi baru untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam mengakses serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses institusi demokrasi.
- c. Menurut keminfo, *E-government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
- d. *World Bank* mendefinisikan *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam ranah pemerintahan untuk pelayanan prima dan memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah.

E-government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. *E-government* didefinisikan sebagai “penggunaan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya

(Holmes 2000). Sedangkan pendapat lain menurut seorang penulis (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinisikan *e-government* adalah salah satu cara pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya web berbasis aplikasi, untuk menyediakan akses pelayanan yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat dan juga bisnis. *E-government* dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan website, komunikasi internet, dan dalam beberapa hal lainnya *e-government* merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya. Dari rumusan pengertian tersebut bahwa *e-government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan, yakni;

- 1) Meningkatkan efisiensi dan *cost effectiveness* dari pemerintahan.
- 2) Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.
- 3) Memberikan akses informasi kepada public secara luas.
- 4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat.

Dalam Inpres No 3 tahun 2003 *e-government* adalah sebagai berikut: “*E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interkatif”. Secara umum *e-government* di definisikan sebagai pemerintahan elektronik *digital government*, *online government* dan *transformational government* adalah pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis, serta hal lain yang bersangkutan dengan pemerintahan. *E-government* dapat di aplikasikan dalam berbagai ranah pemerintahan misalnya pada legislative, yudikatif, eksekutif, maupun administrasi public untuk meningkatkan proses pemerintahan yang baik dan demokratis. Istilah *e-government* adalah istilah yang komprehensif yang kadang-kadang disebut sebagai on-line pemerintah atau pemerintah berbasis internet. Dawes (2002) memberi kita rasa multidimensionalitas ketika dia menyatakan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung operasi pemerintah, yang melibatkan masyarakat, dan menyediakan layanan pemerintah

Beberapa factor yang menyebabkan mengapa definisi *e-government* sangatlah beragam yang semua bermuara pada beberapa prinsip antara lain:

- 1) Konsep *e-government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi penerapannya dalam pemerintahan berbeda-beda sehingga konsepnya pun menjadi sangat beragam.
- 2) Wahana aplikasi *e-government* sangatlah luas dengan sedemikian banyaknya tugas dan tanggungjawab pemerintah terhadap suatu bangsa dan

Negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya dengan berbagai jenis interaksi maupun transaksi.

- 3) Pengertian serta penerapan *e-government* di berbagai Negara tidak dapat di pisahkan dalam kondisi internal baik secara makro dan mikro dari Negara-negara yang bersangkutan. Sehingga pemahamannya sangatlah di tentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, ekonomi, pandangan politik, dari berbagai pemerintahan dari Negara yang bersangkutan.

3. Tujuan dan Manfaat *Electronic Government (E-government)*

Ada empat hal yang menjadi peran dan diterapkannya *e-government*, menurut Anwar (2003) yaitu:

- a. Terciptanya hubungan secara *e-government* antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
- b. Melaksanakan perbaikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik.
- c. Menunjang *good governance* dan kerbukaan.
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

E-government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Misuraca (2007) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan *e-government*, yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

- 1) Dimensi Ekonomi, Dalam hal ekonomi, manfaat *e-government* di antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih

baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

- 2) Dimensi Sosial, Dalam hal sosial, manfaat *e-government* cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.
- 3) Dimensi Pemerintahan, Dalam hal pemerintahan, manfaat *e-government* dapat meningkatkan tercapainya *good governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. *E-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

4. Klasifikasi *E-Government*

Indrajit (2006), dalam bukunya *Electronic Government* menjelaskan tipe relasi dalam *e-government* dapat dibedakan dalam empat tipe sebagai berikut :

- a. *Government to Citizens* (G2C) Tipe G to C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata

lain tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui saluran akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

b. *Government to Business (G2B)* Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktifitas sehari-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entity berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

c. *Government to Governments (G2G)* Era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan di negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada

hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

- d. *Government to Employees (G2E)* Pada akhirnya aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan tingkatan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan elektronik, Jeffrey W. Seifert (2003), mengklasifikasikan menjadi *e-government* empat jenis, yakni sebagai berikut:

- 1) *Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah
- 2) *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam website pemerintah
- 3) *Transaction*, yaitu web daerah selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah

4) *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan publik meningkat secara terintegrasi.

Menurut Andrianto (2007) pada tataran implementasi, terdapat tiga tingkatan *e-government* yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah sebagai berikut:

a) *Booklet (to publish)*, merupakan implementasi *e-government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Didalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (*website*) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan.

b) *Interact*, Terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Sedangkan yang kedua adalah pemerintah

menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya)

c) *Transact*, Interaksi dua arah seperti pada kelas *Interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

6. Penerapan *E-government* di Indonesia

Pembahasan mengenai penerapan *e-government* bukan berarti hanya menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan mempunyai pembahasan yang lebih mendalam daripada itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan *e-government*, karena untuk menjalankan *e-government* diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan

memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Spektrum implementasi aplikasi *e-government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi. Pengertian dan penerapan *e-government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Kemudian dalam konteks *e-government*, maka kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasis komputer, karena untuk mewujudkan *e-government* tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung

yaitu komputer. Sistem informasi yang berbasis komputer menggunakan komponen-komponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, *software* dan *hardware*. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasis komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasis komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasis komputernya belum bagus.

Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan *e-government* hanyalah negara-negara maju (dalam konteks *e-government* seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informasi dari lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara. Tujuan dari penerapan *e-government* yang disarikan dari pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat. Tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, dimana yang diharapkan dari penerapan konsep *e-government* adalah restrukturisasi sistem pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan *e-government* bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan *e-government*.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *E-government*

Menurut hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government*, untuk mengimplementasikan konsep-konsep digitalisasi dalam sector public, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketiga elemen sukses tersebut adalah *support*, *capacity* dan *value* (Indrajit, 2002).

Pertama *support*, Elemen *support* adalah elemen yang paling penting dalam mengembangkan *electronic government*. Pengembangan *e-government* memerlukan dukungan atau di sebut juga *political will* dari pemerintah agar konsep *e-government* dapat di terapkan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai instansi pembangunan dan pengembangan maka *e-government* tidak dapat di laksanakan. Bentuk-bentuk dukungan yang dapat pemerintah lakukan adalah:

- a. Saling menyepakati kerangka *electronic government* sebagai pondasi dan salah satu kunci sukses Negara dalam mencapai tujuan dan visi misi bangsa dan Negara sehingga harus mendapatkan prioritas yang tinggi.
- b. Mengalokasikan sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) pada setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep *e-government* dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya serbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung dan pencipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan *e-government*, misalnya terdapat regulasi yang jelas.

d. Mensosialisasikan konsep *e-government* secara menyeluruh, konsisten, dan kontinyu pada kalangan birokrat sebagai actor yang akan menyelenggarakan *e-government* dan secara umum mensosialisasikan pada masyarakat melalui kampanye.

Kedua, *capacity*, maksud dari elemen *capacity* adalah adanya unsur kemampuan ataupun keberdayaan dari pemerintah untuk mewujudkan impian *e-government* menjadi kenyataan. Terdapat tiga minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah yang berhubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai karena fasilitas ini menunjang keberhasilan *e-government*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi yang diperlukan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan tujuan atau asas manfaat yang diharapkan.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa ketiadaan satu atau lebih dari sebuah elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya menerapkan *e-government*, terlebih lagi karena banyaknya fasilitas dan sumberdaya yang berada diluar jangkauan (wilayah control) pemerintah. Justru menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mencari solusi akibat

dari kurangnya sumber daya untuk memenuhi ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan perusahaan swasta, bermitra dari sector non public, mengalihdayakan (kontrak *outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki dan lain-lain.

Ketiga, *Value*, elemen pertama dan elemen kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dalam penerapan *e-government* tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan *e-government* bukanlah kalangan pemerintah itu sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemerintah haruslah lebih teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat (*value*) yang secara signifikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah dan akan mempersulit usaha pengembangan konsep *e-government*.

Perpaduan antara tiga element penting akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-government* yang akan membentuk system saraf pusat jaringan *e-government* yang merupakan kunci sukses utama keberhasilan penerapan *e-government* tersebut.

8. Aspek- Aspek Dalam Aplikasi *Electronic Government (E-government)*

Rianto dan Tri Lestari dalam bukunya Polri dan Aplikasi *E-government* Dalam Pelayanan Publik (2012: 43) sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan *e-government* terdiri dari :

a. *Hardware*

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (*hardware*). Sebuah aplikasi *e-government* ada kalanya cukup dengan sebuah atau beberapa komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan sebuah jaringan LAN (*Local Area Networking*) yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara intern. Serta WAN (*Wide Area Networking*) yaitu jaringan tanpa kabel yang biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan jaringan global (internet). Untuk jenis aplikasi yang terakhir ini biasanya membutuhkan banyak komputer seperti *database server, application server, proxy server, firewall server, email server, domain server*, dan lain sebagainya. Spesifikasi teknis masing-masing disesuaikan dengan fungsinya. Beberapa fungsi server dapat digabungkan, tergantung pada beban kerja. Untuk server yang memiliki beban kerja cukup berat sebaiknya disiapkan tersendiri.

b. *Software*

Sumber daya *e-government* lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak komputer (*Software*). Di mana *software* dibagi menjadi dua macam yaitu *software* operasi dan *software* aplikasi. *Software* operasi merupakan *software* penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya. Sedangkan *software* aplikasi merupakan program terapan, misalnya operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad, power point, dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam).

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersediaan SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi programme administrator jaringan, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. bahkan komputer memberi sumbangan keberhasilan yang cukup signifikan. Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) relative mudah untuk dipenuhi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang peduli terhadap perubahan merupakan pekerjaan besar. Mewacanakan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar. Sikap dan perilaku yang sudah terpolat selama bertahun-tahun tentu tidak cukup untuk dirubah dalam waktu sekejap, melainkan

memerlukan waktu atau proses dan rekayasa sosial yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

d. Data dan Informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor *e-overnment*. padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses *e-government* guna mendukung tujuan penyebaran informasi.

e. Struktur organisasi

Sebuah kebijakan ditetapkan untuk dilaksanakan guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, siapa dan bagaimana melaksanakan kebijakan *e-government* itu. Dari berbagai referensi menyatakan bahwa idealnya implementor *e-government* adalah lembaga struktural yang berada satu tingkat di bawah *top leader*, hanya saja idealisme ini berbenturan dengan kebijakan efisiensi dan restrukturisasi kelembagaan yang menganut asas "miskin struktur tetapi kaya". Dengan kondisi ini, besar kemungkinan kebijakan *e-government* dilaksanakan oleh lembaga struktural yang berada dua atau bahkan tiga tingkat di bawah *top leader*. Penataan kelembagaan *e-government* sebaiknya disesuaikan dengan polakerja. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dengan pola kerja *e-government* menganut sistem *distributed processing*. Meskipun proses penyelenggaraannya tersebar tetapi tetap

mengkerucut pada satu simpul organisasi pada umumnya uraian tugas dan fungsi suatu lembaga masih bersifat makro dan tidak detil, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan dan memperkuat fungsi koordinasi perlu diurai lebih lanjut dalam kebijakan prosedur operasional. Prosedur ini meliputi kegiatan penyusunan aplikasi *e-government*, pengumpulan, pengolahan, dan pelaksanaan implementasi *e-government* mempunyai landasan yang cukup untuk merealisasikannya.

f. Komunikasi

Kebijakan *e-government* adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai persepsi yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan *e-government*. Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun persepsi yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang *e-government*.

g. Sikap Pelaksana

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan *e-government* secara konsisten maka respon positif. Instansi atau personel lainnya yang diposisikan sebagai pelanggan, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-produk *e-government*, seperti produk pusat data, aplikasi pendukung pekerjaan kantor, aplikasi pelayanan publik, email, SMS dan produk-produk lainnya.

C. Kerangka Pikir

Dari penjelasan proposal penelitian tersebut maka peneliti memperjelas dan menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema sederhana yang bertujuan untuk mempermudah atau memperjelas objek yang akan diteliti yaitu *Penerapan E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep*. Setiap perubahan dan pengembangan dapat menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan *e-government* harus di rencanakan terlebih dahulu serta di laksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistic serta sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi

adalah pelayanan pemerintah kepada publik. Ada 4 manfaat diterapkannya *e-government* salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai manfaat tersebut diukur dengan beberapa indikator yang digambarkan melalui skema sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir dalam penelitian ini, maka peneliti ingin melihat bagaimana penerapan *e-government* di badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten pangkep, serta masyarakat yang ikut melibatkan diri pada penggunaan *e-government* (Aplikasi Litbang Pangkep) tersebut. Dimana fokus penelitian ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan *e-government*. Peneliti menggunakan teori Rianto dan Tri Lestari (2012) dengan menggunakan beberapa komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan *e-government* misalnya *hardware*, *software*, *human*

resources, data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing fokus penelitian yang akan diteliti sehingga memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa yang diteliti tersebut. Dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. *Hardware*

Hardware adalah perangkat-perangkat keras yang digunakan dalam mengoperasikan *e-government* di Balitbangda.

2. *Software*

Software adalah *e-government* atau aplikasi yang di kembangkan oleh Balitbangda dan sejauh mana saat ini aplikasi tersebut dijalankan.

3. Sumber daya manusia

Orang-orang yang berperan dalam mengoperasikan jalannya *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Balitbangda memiliki lima sumber daya manusia yang bertugas untuk memastikan jalannya *e-government* tersebut. Sumber daya manusia terdiri dari ketua, sekretaris, dan tiga orang anggota dengan tugasnya masing-masing.

4. Data dan informasi

Data merupakan hasil laporan dari masyarakat yang diinput melalui aplikasi Litbang Pangkep. Data dapat berupa laporan ataupun saran inovasi. Sedangkan informasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun telah dilaksanakan yang di input kedalam web/app atau di youtube. Informasi dapat berupa kegiatan terbaru yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep ataupun balasan dari laporan-laporan yang masuk ke dalam aplikasi.

5. Struktur organisasi

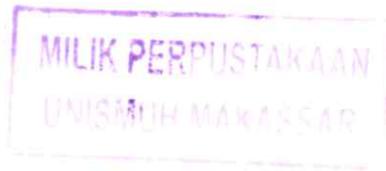
Struktur organisasi adalah proses pembagian tugas yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten Pangkep dalam penerapan *e-government*, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada sumber daya manusia yang ada sesuai dengan *skill* masing-masing.

6. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan pengarahan atau pemberitahuan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, atau bentuk pertemuan lainnya. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten Pangkep adalah proses sosialisasi untuk memperkenalkan adanya inovasi penerapan *e-government* Litbang Pangkep untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ataupun mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

7. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana adalah ke konsistenan pihak Balitbangda Kabupaten Pangkep dalam menerapkan *e-government*. Sosialisasi adalah salah satu



tindakan yang dilakukan oleh pelaksana dalam menerangkan hal-hal terkait dengan inovasi tersebut. Mulai dari kegunaan maupun fungsi-fungsi berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena adanya inovasi baru sebuah aplikasi berbasis digital yang di ciptakan oleh seorang inovator di Balitbangda tersebut. Penelitian ini di laksanakan selama dua bulan setelah selesai seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai *E-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif. Penelitian ini sangat penting untuk memahami sebuah inovasi berbasis aplikasi digital yang kembangkan langsung oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, laporan perizinan, maupun pelayanan lainnya dengan hanya mengakses melalui telephone genggam.

Sehingga metode pengamatan dan pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut sejalan dengan yang di kemukakan oleh Sugiyono (2013), bahwa penelitian kualitatif mempunyai karakteristik yang lebih menekankan data di balik yang teramati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tentang penerapan *e-government* di badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten pangkep adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari informan pegawai Balitbangda Pangkep dan masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara.

C. Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari informan, hasil observasi maupun fakta-fakta yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu penggunaan aplikasi di ambil dari kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten pangkep. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Secara aplikatif, data primer ini di kumpulkan oleh peneliti selama proses pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi terhadap penerapan *e-government* balitbangda pangkep. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan atau terlibat langsung dalam penerapan aplikasi tersebut.
2. Data sekunder merupakan data-data tertulis atau berupa gambar yang dapat di gunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis data primer. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku referensi, jurnal, dokumentasi, serta laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan aplikasi pemerintahan.

D. Informan Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian deskriptif kualitatif maka data penelitian ini merupakan data primer yang sumber data penelitian di peroleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini yaitu wawancara informan.

Tabel.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jurusan	Jabatan
1.	Muh. Mattuala'ada, SE,MM	Manajemen SDM	Ketua
2.	Ratnawati Mentari,S.Pi., MM	Manajemen SDM	Sekretaris
3.	Ibnu Mas'ud S,Pd	PLB	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang di perlukan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang di peroleh dengan beberapa metode antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015). Adapun dokumentasi yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah pada tanggal 25 januari 2021 yaitu pengambilan dokumen atau data-data yang berkaitan langsung dengan inovasi aplikasi Balitbangda Pangkep berupa profil instansi, tugas dan fungsi Balitbangda, serta beberapa pengambilan gambar yang ada di instasi maupun pengambilan gambar selama proses wawancara berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dan bersifat mendalam. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti terlebih dahulu menetapkan masalah yang akan dipertanyakan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Balitbangda yang berhubungan langsung dengan penerapan *e-government* tersebut. Wawancara dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 05 Februari 2021 dan tanggal 08 Februari 2021, adapun wawancara yang dilakukan dengan ahli IT yang bukan merupakan bagian dari Balitbangda yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021 mengenai kendala-kendala umum yang terjadi dalam penerapan *e-government*.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2015:204) observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi yang pertama kali peneliti lakukan adalah cek lokasi penelitian dan memastikan kebenaran adanya penerapan *e-government* di instansi tersebut. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi sebanyak sebelas kali pertemuan untuk memastikan apakah data-data sebelumnya yang telah diperoleh benar-benar valid atau tidak, serta untuk memperjelas

data hasil wawancara sebelumnya dan data tambahan yang mendukung adanya penerapan *e-government* tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk mengelolah kembali data yang telah di peroleh untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Menurut Miles dan Huberman *Dalam Sugiyono 2012:92-99* mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Komponen tersebut antara lain:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Pada penelitian ini, secara teknis adalah data-data yang telah di organisir dan kemudian di sajikan dalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi dan menyiapkan dokumen sebagai penunjang data, Karena data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah di pahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat di lakukan dalam bentuk uraian, hubungan kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Dalam hal ini penyajian data digunakan peneliti untuk menguraikan secara singkat mengenai penerapan *e-government* di badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten pangkep.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penulisan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal namun juga tidak. Penarikan kesimpulan merupakan sebuah temuan baru dan sebelumnya belum pernah ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum terlalu jelas hingga menjadi lebih jelas.

5. Teknik Pengabsahaan Data

Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi yaitu proses pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sesuai dengan pengertiannya, triangulasi ini terdiri atas tiga proses yaitu:

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek atau menganalisis data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan data dengan wawancara, observasi, atau teknik lain yang sama diwaktu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pada narasumber yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

1. Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri serta bahan rekomendasi kepada satuan kerja Unit Eselon I di Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) KabupatenPangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang berdiri pada tahun 2016 berdasarkanPeraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentunya harus mengikuti arahan seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut bahwa hasil kelitbangan di pemerintahan daerah menjadi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi

bagi perangkat daerah di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Balitbangda Pangkep mensosialisasikan hasil-hasil kelitbangannya, agar dapat dijadikan bahan rujukan bagi Perangkat Daerah dalam pengambilan kebijakan, serta sebagai alat kontrol bagi kepala daerah, anggota DPRD dan masyarakat terhadap perangkat daerah terkait dengan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari hasil-hasil kelitbangan tersebut.

2. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Susunan struktur organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada bagan dibawah ini yang terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub bagian program dan kerjasama;
 - 2) Sub bagian keuangan;
 - 3) Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 1) Sub bidang penyelenggaran pemerintahan;
 - 2) Sub bidang pemerintahan desa;
 - 3) Sub bidang data dan pengkajian peraturan;
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - 1) Sub bidang sosial dan budaya;
 - 2) Sub bidang kependudukan;

- 3) Sub bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 1) Sub bidang ekonomi;
 - 2) Sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) Sub bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi
 - 1) Sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
 - 2) Sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - 3) Sub bidang diseminasi kelitbangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Susunan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep diatas sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Kabupaten Pangkep. Dan untuk lebih memperjelas struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Petugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari petugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Badan Penelitian dan Pengembangan Dearah dipimpin oleh seorang pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- 2) Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- 4) Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- 5) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- 8) Pengelolaan administrasi dan ketatausahaan badan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpuetakaan dan dokumentasi;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secretariat terdiri dari beberapa sub bagian dengan tugas dan fungsi masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sub bagian program dan kerjasama dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas:
 1. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 3. Fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama;
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 2. Penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 3. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- c) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut,
1. Melakukan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
 2. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 3. Pengelolaan asset;
 4. Penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi, dan dokumentasi;
 5. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Dan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 6) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- 7) Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- 8) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibagi menjadi tiga sub bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang terdiri dari:

a) Sub bidang data penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan; meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat; dan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub bidang pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub bidang data dan pengkajian peraturan yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
2. Penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru;
3. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang sosial dan kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dan kependudukan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang sosial dan kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;

- 4) Penyiapan bahan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- 6) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sosial dan Kependudukan juga terdiri dari tiga sub bagian dengan tugas masing-masing dalam menyelenggarakan fungsinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang sub bidang yang mempunyai tugas:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya yang meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b) Sub Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, memfasilitas, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan meliputi aspek-aspek

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, memfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Bidang ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian di bidang ekonomi dan pembangunan;

- 3) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan juga terbagi antara tiga sub bidang dengan tugas dan menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:

- a) Sub bidang ekonomi dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
- b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan

dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan memfasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana, meliputi dalam aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang inovasi dan teknologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka bidang inovasi dan teknologi menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta memfasilitasi penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- 2) Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- 4) Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- 5) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- 8) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada Bidang Inovasi dan Teknologi juga mempunyai beberapa sub bidang dengan tugas masing-masing, diantaranya adalah;

- a) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;



2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan investasi di bidang difusi inovasi dan teknologi;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah bidang dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- 3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 4) Jumlah jabatan fungsional berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan terpilih yang berhubungan langsung dengan penerapan *e-government* tersebut yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui *hardware*, *software*, *human resources*, data dan informasi, komunikasi, truktur organisasi, dan sikap pelaksana pada penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan-informan

terpilih yang terkait penerapan *e-government* yaitu Ketua Kepala Bidang Aplikasi Litbang Pangkep, Sekretaris Aplikasi Litbang Pangkep, dan Masyarakat ahli IT. Adapun hasil tentang penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan di uraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum *E-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan merupakan *website* yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, melakukan aduan/saran maupun penyampaian aspirasi. Agar lebih mengoptimalkan fungsi *website* di gadget, maka dibuat pula rancangan aplikasinya yang berbasis OS Android. Terkait narasi tersebut berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Bidang Balitbangda Kabupaten Pangkep:

“Aplikasi Litbang Pangkep merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Balitbangda sebagai akses masyarakat dengan mudah untuk menyampaikan pengaduan dan informasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengaduan. Dalam hal ini masyarakat bisa langsung mengakses secara online lewat aplikasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2021).

Lanjut beliau mengungkapkan:

“Sebenarnya aplikasi ini sangat bagus tapi sekarang tidak bisa di akses karena sudah di hack aplikasinya”(Hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *e-government* yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah suatu wadah yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membangun dan menerapkan teknologi informasi ke

dalam sebuah wujud aplikasi dengan tujuan memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aplikasi Litbang Pangkep merupakan *e-government* yang bertipe *government-to-citizen* (G-to-C) adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang digunakan oleh masyarakat agar dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Namun pada fakta lain yang juga disampaikan oleh Ketua Balitbangda bahwa saat ini aplikasi tersebut sedang di hack atau dalam masalah, sehingga tidak lagi dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat.

2. Alur-Alur penerapan *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Aplikasi Litbang Pangkep merupakan wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi atau saran inovasi melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Kehadiran Aplikasi Litbang Pangkep akan memberikan kesempatan untuk melakukan control utamanya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh SKPD dan seluruh unit kerja pemerintah Kabupaten Pangkep. Berikut adalah hasil wawancara dengan pengelola Aplikasi Litbang Pangkep:

“Untuk menangani pengaduan atau informasi kita sediakan website kadang juga masyarakat datang langsung dan kami juga punya youtube yang sebenarnya sudah bisa dikomersilkan karena subscribarnya sudah ribuan.”(Hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2021).

Berdasarkan wawancara diatas adapun alur penerapan *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep disediakan *web.app* yang dapat langsung di gunakan oleh masyarakat.

a. *Online Website* Aplikasi Litbang Pangkep

- 1) Masyarakat mengakses aplikasi yang didalamnya terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Jika informasi yang dibutuhkan belum terupload maka dapat mengisi fitur pengaduan.
- 2) Pengaduan yang dikirimkan dan diterima oleh satuan kerja perangkat daerah Balitbangda Pangkep akan di proses 1x24 jam.
- 3) Pengaduan yang diterima akan direspon dengan menyiapkan data-data yang masyarakat inginkan.
- 4) Masyarakat menerima jawaban yang di upload ke dalam aplikasi.

b. Youtube Balitbangda Pangkep

Situs youtube Balitbangda Pangkep berisi video-video jalannya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda ataupun beberapa bentuk kinerja yang di upload dalam bentuk video singkat. Masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung dapat mengakses youtube “BALITBANGDA PANGKEP”.

Supaya keberlangsungan website dan aplikasi dapat terus berlanjut, maka di bentuk admin website dan aplikasi sebanyak 5 orang yang masing-masing memiliki peran yang krusial. Hal ini juga sejalan dengan usulan dari salah seorang peserta sosialisasi. Admin ini terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 3 orang anggota. Berikut tugas dan fungsi dari masing-masing admin:

1. Tugas Ketua :
 - a. Mengatur dan mengontrol segalanya terkait *Website* dan Aplikasi;
 - b. Dapat mengubah *password* website dan aplikasi;- Memberitahu *password* terbaru kepada tim.
2. Tugas Sekretaris :
 - a. Melaksanakan perintah Ketua;
 - b. Mengganti peran Ketua jika diminta oleh Ketua;
 - c. Memasukkan berita terkait acara Bidang Inovasi dan Sekretariat secara real time di web/app;
 - d. Memasukkan data inovasi dalam bentuk PDF ke dalam web/app s.d. 10tahun;
 - e. Mengontrol berjalannya fungsi *website* dan aplikasi;
 - f. Melaporkan kepada Ketua jika menemui permasalahan;
 - g. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.
3. Tugas Anggota :

Anggota 1 :

 - a. Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;

- b. Memasukkan berita terkait acara Bidang Pemerintahan secara *real time* di *web*;
 - c. Mengelola *Google One* Balitbangda Pangkep;
 - d. Memasukkan data perencanaan dan pelaporan dalam bentuk PDF kedalam *web/app* s.d. 10 tahun;
 - e. Mengarsipkan seluruh data perencanaan, pelaporan, inovasi, dan regulasi ke dalam UFD dan *Cloud Drive*.
 - f. Mengontrol berjalannya fungsi *website* dan aplikasi;
 - g. Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan;
 - h. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.
- Anggota 2 :
- a. Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;
 - b. Memasukkan berita terkait acara Bidang Sosial secara *real time* di *web/app*;
 - c. Memberitahu Ketua/Sekretaris jika ada saran/aduan yang tidak di tanggap > 3 hari;
 - d. Memasukkan data regulasi yang masih relevan dan berlaku dalam bentuk PDF ke dalam *web/app*;
 - e. Menghapus data regulasi yang sudah tidak relevan dan tidak berlaku di *web/app*.
 - f. Mengontrol berjalannya fungsi *website* dan aplikasi;
 - g. Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan;
 - h. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.

Anggota 3 :

- a. Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;
- b. Memasukkan berita terkait acara Bidang Ekonomi secara *real time* di web/app;
- c. Memberitahukan kepada Ketua/Sekretaris jika ada saran/aduan lewat web/app dan email;
- d. Mengarsipkan video Balitbangda ke dalam YouTube;
- e. Mengontrol berjalannya fungsi *website* dan aplikasi;
- f. Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan;
- g. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.

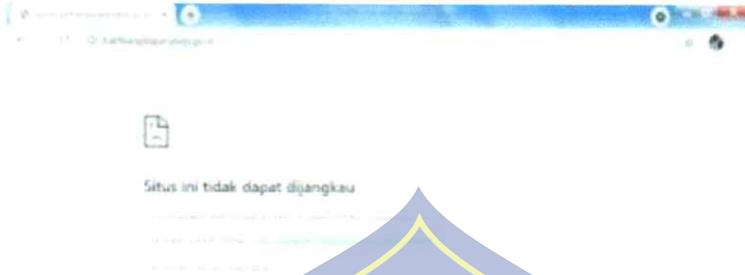
3. Penggunaan Aplikasi *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Aplikasi Litbang Pangkep adalah aplikasi berbasis android yang dapat memberikan kemudahan dalam implementasi system penanganan pengaduan. di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Aplikasi Litbang Pangkep ini berfungsi untuk mengelolah informasi, pertanyaan, saran atau pengaduan masyarakat yang langsung melalui aplikasi.

“Masyarakat bisa langsung login di aplikasi karena disitu sudah lengkap, tapi sekarang aplikasi itu tidak bisa digunakan karena di hack, sudah tiga kali kami melakukan percobaan perbaikan dan masih tetap kena hack.”(Hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2021).

Untuk lebih memperjelas, sebelumnya system pengaduan dan informasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat langsung di akses oleh masyarakat dari aplikasi yang telah di unduh di

playstore, namun saat ini web/app tersebut sedang mengalami beberapa masalah teknis yang menyebabkan tidak dapat lagi diakses atau dibuka oleh masyarakat sebagaimana gambar berikut:



Gambar.IV.2. Tampilan website Balitbangda

Sumber: www.balitbangdapangkep.go.id

a. Menginstal Aplikasi

Aplikasi Litbang Pangkep adalah *e-government* yang berbasis aplikasi android, sehingga untuk membuka dan mengakses aplikasi tersebut membutuhkan *software* berupa aplikasi yang dapat di install di playstore seperti pada gambar berikut:



Gambar IV.3. Tampilan Aplikasi Litbang Pangkep di Playstore

Sumber: Balitbangda.go.id

b. Membuka Aplikasi

Aplikasi Litbang Pangkep saat ini sedang mengalami beberapa masalah teknis, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Tampilan utama Aplikasi Litbang Pangkep adalah sebagai berikut:



Gambar IV.4. Tampilan Aplikasi Balitbangda

Sumber: www.balitbangdapangkep.go.id

Terdapat beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh apa saja yang mereka butuhkan, namun karena adanya kendala pada teknis tersebut, maka fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tidak dapat diakses. Berikut adalah salah satu tampilan fitur dalam aplikasi saat dibuka antara lain:



Gambar IV.5. Tampilan Fitur Aplikasi setelah Dibuka

Sumber: www.balitbangdapangkep.go.id

hosting yang di pergunakan untuk melakukan analisa dan memberikan solusi. Kasus yang paling sering terjadi adalah IP koneksi internet terblokir di *firewall server* karena beberapa hal. Selain itu, bisa juga sedang terjadi masalah interkoneksi dari ISP (*provider layanan internet*) yang di pakai dengan *server hosting website* tersebut.

2) Masalah Domain

This site can't be reached tidak hanya disebabkan oleh masalah koneksi internet. Pesan error tersebut bisa juga disebabkan karena domain yang bermasalah. Selain pesan *this site can't be reached*, indikasi lain yang menandakan ada masalah pada domain antara lain pesan *this domain name expired* dan tampilan halaman mercusuar. Masalah pada domain bisa di selesaikan dengan menghubungi layanan penyedia domain, untuk dilakukan pengecekan dan diberikan solusi selengkapya. Untuk problem solving pada masalah domain memerlukan waktu propagasi sekitar 1-24 jam atau bahkan lebih, untuk kasus perpanjangan masa aktif domain yang sudah terlanjur *expired*.

3) Masalah Skrip Website

Internal server error 500 adalah pesan *error* paling umum yang menandakan sedang terjadi masalah pada *skrip website* tersebut. Apabila tidak tahu mengenai masalah tersebut, segeralah hubungi *technical support* dari layanan hosting yang di pergunakan. Penyedia

layanan hosting akan membantu menganalisa penyebab *error*, menjelaskannya serta membantu semaksimal mungkin supaya *website* dapat tampil kembali.

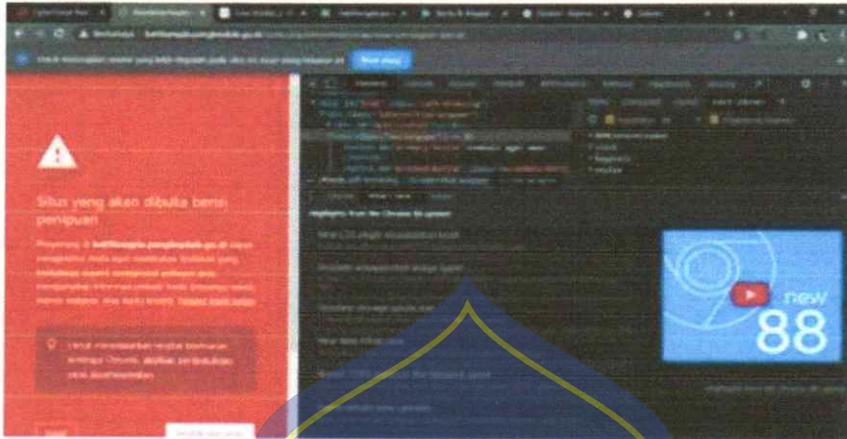
4) Masalah Hosting

Masalah yang paling sering terjadi pada website adalah masalah pada hosting. Tidak perlu panik jika website tiba-tiba menampilkan tulisan *this account has been suspended*. Pesan error tersebut umumnya menandakan masa aktif layanan hosting anda sudah expired, sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Apabila sedang terjadi masalah di *server* hosting, biasanya akan ada pengumuman resmi dari pihak penyedia layanan hosting, yang menginformasikan status, penyebab kendala, dan estimasi penanganan sampai pulih kembali.

5) Internet Positif

Internet positif adalah sebuah filter konten yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia melalui Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Filter ini dibuat untuk memblokir konten-konten negatif supaya tidak bisa diakses melalui koneksi internet dalam negeri Indonesia. Apabila website tidak bisa diakses dan menampilkan halaman Internet Positif, berarti ada konten di dalam website tersebut yang mengandung unsur-unsur pornografi, perjudian dan hal-hal lain yang melanggar hukum Indonesia.

Berikut adalah detail aplikasi yang saat ini sedang mengalami beberapa kendala teknis adalah sebagai berikut:



Gambar IV.7. Salah Satu Akar Masalah Aplikasi Tidak Dapat Diakses

Sumber: www.balitbangdapangkep.go.id

4. Aspek-Aspek dalam Penerapan *E-Government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Dalam meninjau *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, peneliti membedah penerapan *e-government* tersebut menggunakan teori penerapan yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari yang terdiri dari *hardware*, *software*, *human resources*, data, informasi, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Dalam mempermudah proses peninjauan penerapan *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, peneliti mengklasifikasikan ulang aspek-aspek yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari dalam teorinya menjadi hanya tiga aspek, yaitu *hardware* dan *software*, data dan informasi, serta sumber daya manusia dan sikap pelaksana. Ketiga aspek tersebut akan di analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a. *Hardware* (Perangkat Keras)

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (*hardware*). Sebuah aplikasi *e-government* ada kalanya cukup dengan sebuah atau beberapa komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan sebuah jaringan LAN (*Local Area Networking*) yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara intern. Serta WAN (*Wide Area Networking*) yaitu jaringan tanpa kabel yang biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan jaringan global (internet). Untuk jenis aplikasi yang terakhir ini biasanya membutuhkan banyak komputer seperti *database server*, *application server*, *proxy server*, *firewall server*, *email server*, *domain server*, dan lain sebagainya. Spesifikasi teknis masing-masing disesuaikan dengan fungsinya. Beberapa fungsi server dapat digabungkan, tergantung pada beban kerja. Untuk server yang memiliki beban kerja cukup berat sebaiknya disiapkan tersendiri.

” Kalau sarana kan ada dua, ada SDM dan ada SDA. Kalau di SDM itu otomatis ada beberapa personil yang harus dipersiapkan. Personil itu ada terbagi tiga kalau di kami. Dan ada empat personil untuk *e-government* tersebut, ada yang bagian pengisian data, ada yang memang khusus untuk memasukkan video ke youtube, di website, kemudian ada yang bagian editing, atau memposting, dan kalau pak Kabid sendiri itu dia yang, sebelum kami posting dia harus lihat dulu apakah yang di posting layak atau tidaknya. Jadi sarana dan prasarana yang perlu kami siapkan itu ada semacam computer, meja kerja, ada camera, dan yang menunjanglah untuk kegiatan kami ini. Wifi paling perlu, jadi peralatan computer itu yang paling penting untuk kami sediakan..”(Hasil wawancara 08 Februari 2021).

Lanjut beliau mengungkapkan:

“dan pasti kami juga membutuhkan sama yang namanya *flasdisk* dan printer”.

(Hasil wawancara 08 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Balitbangda dalam mengelolah aplikasi litbang pangkep telah membagi tugas pada beberapa personil yang diberikan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun sarana dan prasarana yang disiapkan tersebut diatas didukung oleh hasil pengamatan peneliti mengenai perangkat keras yang ada di Balitbangda Pangkep yang digunakan untuk mengoperasikan adanya *e-government*, yakni 3 perangkat computer, 2 buah laptop, *flashdisk*, 4 printer, serta 2 *wifi* yang menjadi penunjang adanya *e-government* di Balitbangda.

b. Software (perangkat lunak)

Sumber daya *e-government* lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak komputer (*Software*). Di mana *software* dibagi menjadi dua macam yaitu *software* operasi dan *software* aplikasi. *Software* operasi merupakan *software* penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya. Sedangkan *software* aplikasi merupakan program terapan, misalnya operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad, power point, dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam).

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua sub kepala bidang tim teknis aplikasi Litbang Pangkep:

”untuk *software* itu sendiri disiapkan oleh pihak ketiga. Jadi kemarin kami dipihak ketigakan untuk pengadaan website itu sendiri, jadi ada kami siapkan termasuk aplikasi itu sendiri.(Hasil wawancara 08 Februari 2021).

Aplikasi litbang pangkep adalah *website* berbasis aplikasi yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, mendapatkan informasi, memberikan saran atau usul melalui beberapa fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi litbang pangkep tersebut. Berikut adalah beberapa fitur yang ada dalam aplikasi beserta fungsinya antara lain:

Tabel IV.2 Jenis- jenis Fitur dalam Aplikasi dan Fungsinya

No	Menu	Fungsi Menu
1.	Home	Untuk menampilkan menu awal aplikasi.
2.	Profil	Memuat profil tentang Balitbangda Pangkep.
3.	Linkskip	Penyimpanan semua jenis data dalam bentuk link.
4.	Alamat	Memuat alamat kantor Balitbangda maupun alamat e-majl.
5.	Perencanaan	Untuk mengupload laporan-laporan kelitbangan.
7.	Pelaporan	Untuk mengupload hasil-hasil kelitbangan.
8.	Regulasi	Untuk mengupload tupoksi Balitbangda, perda, pergub, Rik dll.
9.	Randu	Berfungsi sebagai menu yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan aduan dan saran.
10.	Inovasi	Berfungsi untuk mengupload nama-nama inovasi yang terdaftar di Kabupaten Pangkep.

Sumber: Sekertariat Balitbangda (2019)

Kebutuhan minimal untuk menggunakan aplikasi litbang pangkep adalah laptop, computer, *notebook* dan *handphone* dengan dukungan LAN, WLAN, atau *wifi* yang terkoneksi dengan jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat dan terhubung langsung dengan SKPD Balitbangda Pangkep. Aplikasi dapat diakses menggunakan *software* yang dapat di unduh dengan bantuan *play store*, serta diperlukan adanya Microsoft word untuk menyimpan data sebelum di upload kedalam aplikasi.

b. Data dan Informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor *e-overnment*. padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (*database*) menjadi bahan utama proses *e-government* guna mendukung tujuan penyebaran informasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan tim teknis aplikasi Litbang Pangkep:

“Kami menyimpan data dan informasi di laptop dan FD dalam bentuk draf kemudian kami copy dan posting masuk ke website. Jadi kalau sudah bentuk draf kami perlihatkan ke Kepala Bidang kelayakan tulisan kami, setuju beliau langsung kami posting. (Hasil wawancara tanggal 08 Februari 2021).

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Sub Kepala Bidang aplikasi Litbang Pangkep:

“Informasi yang kami sediakan itu semua kegiatan-kegiatan yang ada di Balitbangda. Kajian-kajian yang kami lakukan, penelitian-penelitian yang kami lakukan, penghargaan-perhargaan apa saja yang kami dapatkan, kemudian kegiatan-kegiatan eksternal, dan kerjasama-kerjasama dengan siapa itu kami sebarluaskan, termasuk

anggaran yang kami masukkan disini. Jadi Balitbangda memang transparansi sekali mengenai kegiatan-kegiatan kita yang ada disini.”(Hasil wawancara tanggal 08 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan proses pengaduan dan informasi, pihak pengelola aplikasi Litbang Pangkep menggunakan laptop dan FD untuk menyimpan data dalam bentuk folder yang kemudian akan di posting ke website/app. Informasi yang terdapat di dalam aplikasi Litbang Pangkep terdiri data-data umum terkait profil Balitbangda, visi misi, tugas pokok dan fungsi, maupun data-data mengenai hasil kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para SKPD, termasuk didalamnya anggaran juga diposting kedalam aplikasi tersebut karena salah satu tujuan Balitbangda dalam penerapan *e-government* tersebut adalah adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi programme administrator jaringan, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. Sikap respon biasanya itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan *e-government* secara konsisten maka respon juga akan positif.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua Sub Kepala Bidang Balitbangda Kabupaten Pangkep:

“Kabid kami sebagai penganggungjawab di website ini sebagai penerapan *e-government* itu, beliau melakukan perekrutan personal yang ditetapkan dengan bentuk SK Bupati dan SK Balitbangda. Jadi, bentuk rekrutmennya itu bukan berarti bentuk test dan segala macam, tetapi bentuk rekrutmennya itu melihat personal dari yang mau ditunjuk sebagai tim kerja di penerapan *e-government* tersebut. Setelah kami dilakukan penyeleksian dan kami ditetapkan dalam bentuk SK, kemudian orang-orang yang bertanggungjawab disini itu kami diberikan Bimtek, Bimtek itu dilakukan waktu pada saat kita sebelum mensosialisasikan ke masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021).

Berikut adalah latar belakang pendidikan tim teknis pengelola aplikasi Litbang Pangkep adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Nama, Jabatan, dan Pangkat Tim Teknis Aplikasi Litbang Pangkep

No	Nama	Jurusan	Jabatan
1.	Muh. Mattuala'ada, SE,MM	Manajemen SDM	Ketua
2.	Ratnawati Mentari, S.Pi, MM	Manajemen SDM	Sekretaris
3.	Mustakim Tahir, S. Hi	Hukum Islam	Anggota 1
4.	Muhammad Rais, S. Sos	Sospol	Anggota 2
5.	Kasmawati, S.p	Pertanian	Anggota 3

Sumber: Sekretariat BALITBANGDA

Hal diatas diungkapkan oleh Sekertaris Bidang Aplikasi Litbang Pangkep: Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bahwa dari sumber daya manusia yang disiapkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya sumber daya manusia yang ahli dibidang informatika, namun terlepas dari latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang telah disediakan oleh pengelola aplikasi Litbang Pangkep merupakan

orang-orang yang terpilih serta memenuhi kriteria dan dapat melaksanakan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap operator yang terpilih pun telah diberikan pelatihan agar dapat mengaplikasikan web/app Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep maupun mensosialisasikannya ke masyarakat.

5. Komunikasi

Kebijakan *e-government* adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai persepsi yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan *e-government*.

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari komunikasi antara Ketua Sub Kepala Bidang Aplikasi Litbang Pangkep dengan masing-masing operator SKPD Litbang Pangkep yang terkait dalam penerapan *e-government* tersebut. Adapun pengaduan yang masuk ke dalam Aplikasi Litbang Pangkep untuk kemudian operator atau SKPD terkait memberikan tanggapan atau jawaban terhadap masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekertaris tim teknis Aplikasi Litbang Pangkep:

”Biasanya itu kalau masalah-masalah yang paling banyak itu mahasiswa-mahasiswa, peneliti-peneliti, atau LSM media yang mau informasi-informasi itu biasa permintaan data-data saja, atau mereka hanya mengadu bahwa mohon untuk misalnya menambahkan data ini kesitu.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Lanjut beliau mengungkapkan:

“Kalau data yang mereka cari tidak ada disitu, mereka tinggal mengklik dan menulis pesan aja disitu di layanan, kalau kami sudah dapat begitu kami cepat-cepat merespon. Paling tidak 1x24 jam kami merespon untuk menyiapkan data-data yang mereka pengen, kami membuat drafnya, kemudian kami perlihatkan ke kabid, kemudian di posting kalau sudah disetujui”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2021)

Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun perspsi yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang *e-government*. Hal ini disampaikan oleh sekretaris tim teknis aplikasi Litbang Pangkep:

“Ada bimbingan atau pelatihan khusus yang diberikan untuk semua tim teknis sebelum kita mensosialisasikan website/app ini ke masyarakat.(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021).

Hal lainnya disampaikan sekertaris tim teknis aplikasi Litbang Pangkep:

“Hampir semua kegiatan Balitbangda itu kami jadikan sebagai moment untuk menyebarluaskan aktifitas *e-government* ini. (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, proses komunikasi yang digunakan cukup memadai dan komunikasi yang

dilakukan yaitu tetap melakukan koordinasi antara SKPD dan Ketua Pelaksana dalam menanggapi pengaduan yang masuk. Pengelolah atau operator Aplikasi Litbang Pangkep juga senantiasa melakukan sosialisasi dalam setiap kegiatan mengenai kehadiran *e-government* tersebut walaupun masih kurang maksimal.

6. Sikap pelaksana

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik dengan para pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Ada atau tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan *e-government* secara konsisten maka respon positif.

”saat ini *website* belum bisa dibuka sama sekali, ternyata memang harus membayar, dan sekarang *website* itu semua diambil alih oleh kominfo, nanti kami berkoordinasi dengan dinas kominfo. Jadi nanti kami membayar aplikasi kemudian berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021).

Lanjut beliau mengatakan:

“nanti anggaran barupl lagi baru dibayar, karena belumpi dianggarkan, kalau adami anggarannya langsung dibayar.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini pihak Balitbangda sedang mengupayakan adanya perbaikan terhadap aplikasi Litbang Pangkep yang saat ini tidak lagi dapat di akses oleh masyarakat. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pihak Balitbangda adalah mengusahakan anggaran untuk memperpanjang masa aktif pada layanan hosting agar aplikasi dapat kembali digunakan.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, Balitbangda menciptakan sebuah wadah berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan pengaduan dengan mudah. Keterbukaan pemerintah akan informasi data-data yang dapat diakses oleh masyarakat dan disebarluaskan ke masyarakat lainnya terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public kecuali beberapa informasi tertentu. Pada tanggal 15 juli tahun 2019 Balitbangda melaunchingkan sebuah inovasi baru yaitu *e-government* berupa aplikasi Litbang Pangkep yang sengaja Balitbangda kembangkan untuk dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk melihat bagaimana *e-government* yang ada di Balitbangda, maka peneliti mengangkat beberapa indicator yang digunakan untuk memaksimalkan *e-government* di Balitbangda yaitu: *hardware*, *software*, sumber daya manusia, data dan informasi, komunikasi dan sikap pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai *e-government* di Balitbangda Pangkep bahwa:

1. *Hardware*

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terlepas akan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (*hardware*). Sebuah aplikasi *e-government* ada kalanya cukup dengan sebuah atau beberapa komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan

komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan sebuah jaringan LAN (*Local Area Networking*) yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara intern. Dalam hal ini Balitbangda menyiapkan beberapa jenis perangkat keras yang akan digunakan untuk menjalankan adanya *e-government* di Balitbangda.

Jenis-jenis perangkat keras yang telah dipersiapkan untuk menunjang jalannya *e-government* di Balitbangda Pangkep yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut yakni 3 perangkat computer, 2 buah laptop, *flashdisk*, 4 printer, serta 2 *wifi* yang menjadi penunjang adanya *e-government* di Balitbangda. Sedangkan masyarakat sasaran utama adanya inovasi tersebut dapat mengakses aplikasi setelah mengunduh di *play store* menggunakan HP, PC, atau *notebook*.

2. *Software*

Sumber daya *e-government* lainnya yang cukup penting adalah perangkat lunak komputer (*Software*). Di mana *software* dibagi menjadi dua macam yaitu *software* operasi dan *software* aplikasi. *Software* operasi merupakan *software* penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya. Sedangkan *software* aplikasi merupakan program terapan, misalnya operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad, power point, dan sebagainya. Penguasaan perangkat lunak pendukung komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam).

Indrajit (2006) dalam bukunya *Electronic Government* menjelaskan tipe relasi dalam *e-government* dapat dibedakan dalam empat tipe yang pertama, *Government to Citizens* (G2C) Tipe G to C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Kedua, *Government to Business* (G2B) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktifitas sehari-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entity berorientasi profit. diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengankalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar parapraktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun

lebihjauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Ketiga, *Government to Governments* (G2G) Era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan di negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Keempat, *Government to Employees* (G2E) Pada akhirnya aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Aplikasi Litbang Pangkep merupakan *e-government* yang bertipe *government-to-citizen* (G-to-C) adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang digunakan oleh masyarakat agar dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Aplikasi litbang pangkep adalah *website* berbasis aplikasi yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, mendapatkan

informasi, memberikan saran atau usul melalui beberapa fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi litbang pangkep tersebut.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam menentukan keberhasilan jalannya suatu kebijakan. Setiap kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan Van Meter dan Varn Horn (dalam Widodo 1974). Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa latar belakang tim teknis pada penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten pangkep tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya sumber daya manusia yang ahli dibidang informatika, namun dari hasil wawancara yang telah diperoleh bahwa terlepas dari latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang terpilih telah memenuhi kriteria dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dibekali dengan pelatihan yang rutin.

4. Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan komponen yang menjadi bahan utama proses *e-government* untuk mendukung tujuan penyebarluasan informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa data-data atau informasi yang di sediakan dalam aplikasi tersebut adalah semua jenis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, serta hasil- hasil penelitian yang juga dapat diakses dalam aplikasi tersebut. Tentu dengan adanya data-data yang di upload dalam sebuah aplikasi sangat memudahkan masyarakat yang ingin mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan. Serta adanya fitur aduan yang dapat diakses oleh masyarakat jika ingin melakukan pengaduan.

5. Komunikasi

E-government adalah cara pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses layanan yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat dan juga bisnis. *E-government* dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan website, komunikasi internet, dan dalam beberapa hal lainnya *e-government* merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Balitbangda berharap dengan adanya *e-government* dapat menunjang efektifitas dan efisiensi pelayanan public. Sedangkan komunikasi yang diciptakan antar SKPD adalah proses sosialisasi yaitu memperkenalkan kehadiran aplikasi tersebut yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan

melakukan pengaduan. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan dalam setiap agenda yang dilakukan oleh Balitbangda. Pelatihan juga sering kali dilaksanakan guna untuk meningkatkan keterampilan pada setiap SKPD yang berperang dalam penerapan *e-government* tersebut.

6. Sikap Pelaksana

Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008). Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik dengan para pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Ada atau tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan *e-government* secara konsisten maka respon positif.

Terpenuhinya indikator-indikator dalam menerapkan *e-government* menurut Rianto dan Tri Lestari dapat dikatakan berhasil, tetapi dalam setiap pelaksanaannya belum maksimal hingga kini aplikasi tersebut tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat. Belum maksimalnya penerapan *e-government* di Balitbangda dapat dibuktikan dengan beberapa kutipan wawancara yang mengatakan bahwa aplikasi tersebut telah di hack sehingga tidak dapat digunakan. Namun setelah dilakukan pelacakan oleh peneliti tidak ada percobaan *hacking* pada aplikasi tersebut, melainkan

hosting dan domain yang telah habis masa aktif dan tidak dilakukan perpanjangan. Hosting dan domain sangat erat kaitannya dengan aplikasi atau web. Domain aplikasi berfungsi agar mempermudah pengguna untuk mengakses server. Sedangkan hosting merupakan tempat menyimpan data-data yang diperlukan oleh website atau aplikasi agar dapat di akses. Hosting dan domain aplikasi yang tidak segera dilakukan perpanjangan maka akan di suspend sementara sampai batas waktu tertentu sehingga web atau aplikasi tidak dapat diakses. Domain dan hosting pada aplikasi yang tidak diperpanjang juga otomatis fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tidak dapat digunakan.

Balitbangda sebagai penyelenggara aplikasi Litbang Pangkep selama satu tahun masa percobaan penerapan aplikasi tersebut kini tidak lagi dapat diakses karena domain dan hosting yang telah kadaluarsa dan belum dilakukan perpanjangan. Upaya saat ini yang dilakukan oleh Balitbangda selaku penyelenggara inovasi ialah mengupayakan anggaran untuk memperpanjang masa layanan domain dan hosting aplikasi, karena sebelum dilakukan perpanjangan pada layanan domain dan hosting maka aplikasi tidak dapat digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah peneliti lakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Hardware*, bahwa Balitbangda sudah cukup baik dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung adanya *e-government* di Balitbangda Pangkep.
2. *Software*, bahwa *e-government* atau aplikasi yang saat ini tidak dapat lagi difungsikan atau diakses oleh masyarakat maupun tik teknis Balitbangda Pangkep disebabkan masa aktif layanan hosting telah habis.
3. Sumber daya manusia, bahwa berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia yang berperan dalam *e-government* tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ahli di bidang informatika. Terlepas dari hal tersebut SDM yang berperan dalam *e-government* di Balitbangda terus dibekali pelatihan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
4. Data dan informasi, bahwa data-data dan informasi mengenai Balitbangda serta nama-nama inovasi di Kabupaten Pangkep di upload dalam ke dalam aplikasi sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Balitbangda tidak perlu lagi datang ke kantor untuk memperoleh informasi.

5. Komunikasi, bahwa komunikasi yang dilakukan dalam bentuk arahan atau pelatihan yang seringkali dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan tiap-tiap SKPD.
6. Sikap pelaksana, bahwa saat ini Balitbangda selaku pelaksana *e-government* telah mengupayakan anggaran untuk memperpanjang masa aktif layanan hosting pada aplikasi.

B. Saran

1. Sehubungan dengan factor yang membuat aplikasi tersebut tidak dapat diakses adalah hosting dan domain yang expired maka masalah bisa di selesaikan dengan menghubungi layanan penyedia hosting dan domain, untuk dilakukan pengecekan dan diberikan solusi selengkapny.
2. Dalam hal lain diharapkan kepada pihak Balitbangda untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat atau pengiklanan secara elektronik agar kehadiran Aplikasi Litbang Pangkep dapat diketahui secara lebih menyeluruh di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa Balitbangda mempunyai layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung langsung untuk mendapatkan informasi.
3. Membangun komunikasi yang baik antar SKPD untuk membangun perspektif yang sama serta konsisten mengembangkan *e-government* di Balitbangda.
4. Melakukan lebih banyak pelatihan kepada semua tim teknis untuk lebih menguasai teknis-teknis dalam mengelola aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Amyy . (2013). *Manajemen Perubahan dan Inovasi*. Jakarta: UI Press.
- Pramusinto, Agus. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Richardus Eko Indrajit. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic*.
- Attahara, Hawa. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Logion Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, vol.3 No.1 hal 66-68. ISSN 2528-2068.
- Agus, Widodo. (2016). *Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Surabaya*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 14 nomor 14. Hal 151-164.
- Hildo, Nurul. (2014). *Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 2 Nomor 1. Hal 4-5 ISSN 2303-341x
- Setianto, Arif. (2019). *Inovasi Manajemen Pemerintah Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Inovasi Kebijakan*. Hal 100-105. e-ISSN 2549-5283, p-ISSN 2549-5151.
- Zainuddin. (2019). *Efektifitas Penerapan E-government di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. *Journal of Government and Political*. Vol 2, No 2.
- SM Husain, P Fauziati. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-government (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang)*. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol.13 No.1.
- Noviana, Rina. Dkk. (2012). *Manajemen E-government Berbasis Web Model Government to Citizen (G2C) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol.4 No.3

- Fitriani, Lidya. (2019). *Innovation Organization pada Program One Egency One Innovation di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Ayyung, Nur. (2019). *Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Zulfadli, Muhammad. (2019). *Inovasi Pelayanan Smart City di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Sari, Melinda. (2020). *E-government dalam Smart City Menuju Effective Accountablity dan Well-Being*. Universitas Islam Negri. Makassar
- Wahida, Nurul. (2016). *Penerapan E-government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Simangungsong, Song. (2010). *Pengembangan E-government di Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta. (Diakses pada tanggal 31 November 2020. Pukul 19:30 PM)
- Andi. (2002). *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta. (Diakses pada tanggal 01 Novembe 2020 pukul 20:49 PM)
- Amarta, Dwi Arjuna. (2008). *Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-Pilkada) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (Studi di desa panjunan, kecamatan duduksampean, Kabupaten Gresik)*. Universitas Negri Surabaya. Diakses pada tanggal 01 November 2020 pukul 09:00PM.
- DPRD Pangkep Puji Inovasi Website Balitbangda.(15 Juli 2020). *Makassar.Tribunnews.com*
- Launching Aplikasi Litbang Pangkep. (17 Juli 2020). *Tribun.pangkep.com*
- Seputarilmu.com (Akses pada tanggal 01 November 2020 pukul 19:10PM)

L

A

M

P

I

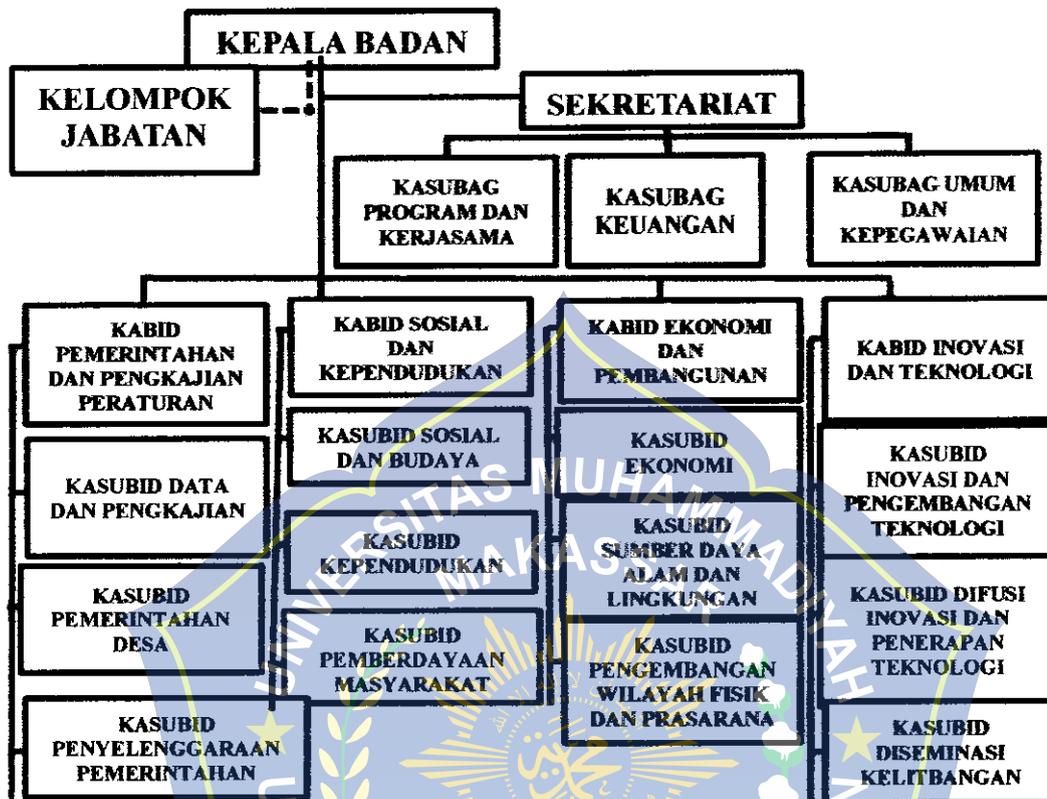
R

A

N



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP



Gambar IV.2. Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Pangkep
 Sumber : Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018

PEDOMAN WAWANCARA

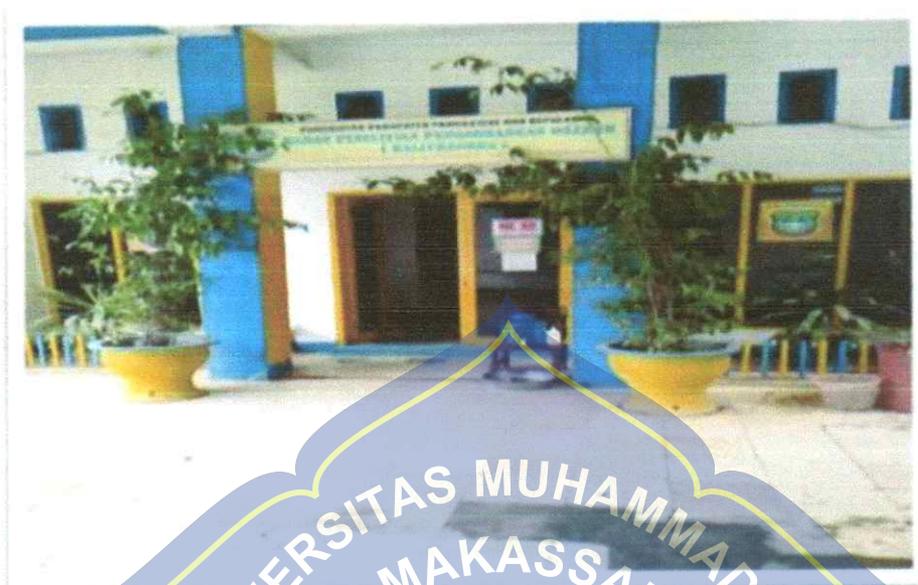
Pedoman wawancara bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul “Penerapan *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Pedoman wawancara ini berdasarkan pada teori Rianto dan Tri Lestari (2006) dalam mewujudkan *e-government*, terdapat beberapa indikator dalam teori yang menjadi pedoman wawancara pada penelitian ini antara lain:

Lokasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep (BALITBANGDA).

Fokus : Penerapan *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- A. Bagaimana Penerapan *e-government* di BALITBANGDA saat ini?
- B. *Hardware* dan *Software*
 1. Apa saja sarana yang disiapkan untuk mewujudkan *e-government*?
 2. Apa saja jenis-jenis *hardware* dan *software* yang digunakan?
- C. Data dan Informasi
 1. Apa yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat?
 2. Informasi apa saja yang disediakan oleh pihak BALITBANGDA untuk disalurkan kepada masyarakat?
 3. Hal apa saja yang biasanya masyarakat laporkan kepada pihak BALITBANGDA?
- D. Sumber Daya Manusia
 1. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan pihak Balitbangda dalam menentukan dan memilih sumber daya manusia?
 2. Apakah ada pelatihan khusus dalam menyaring atau memilih pihak-pihak yang berperang dalam penerapan Aplikasi Litbang Pangkep tersebut?
- E. Komunikasi dan Sikap Pelaksana
 1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk memperkenalkan Aplikasi tersebut?
 2. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut?
 3. Bagaimana tanggapan pihak BALITBANGDA apabila ada pengaduan dari masyarakat?

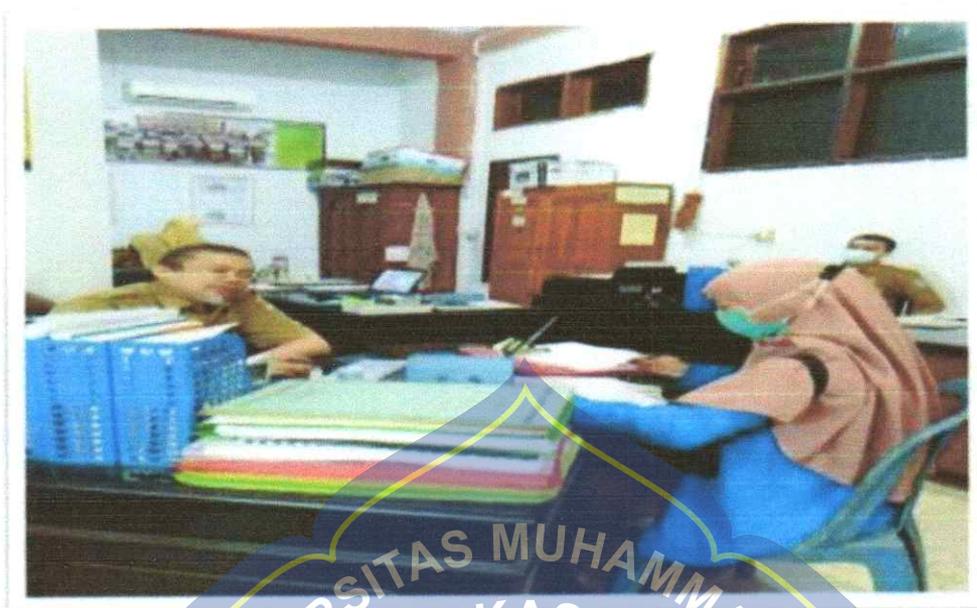
DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.



Sepuluh Budaya Malu ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.

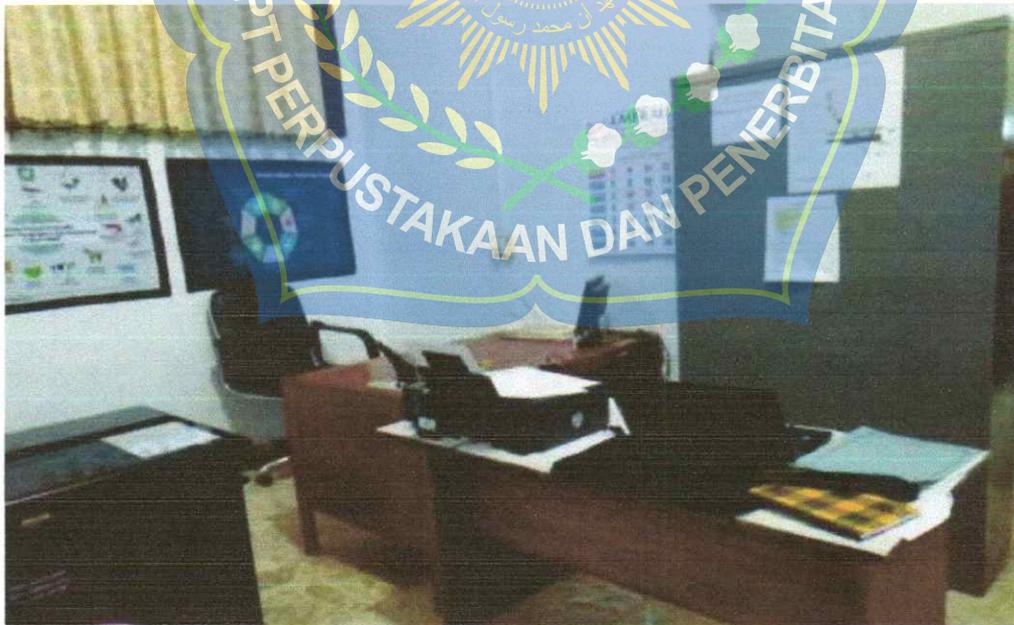
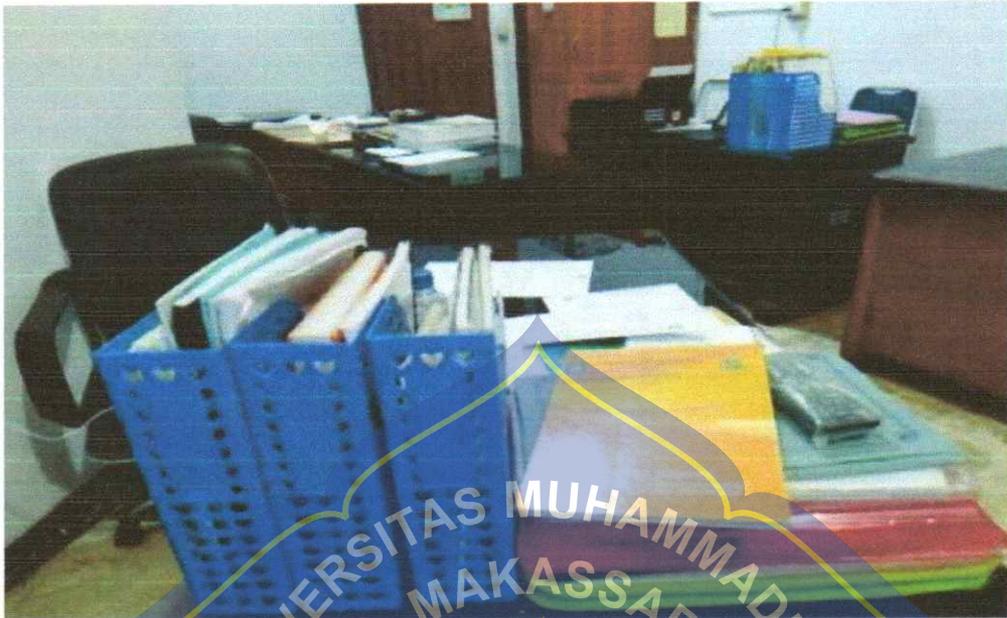


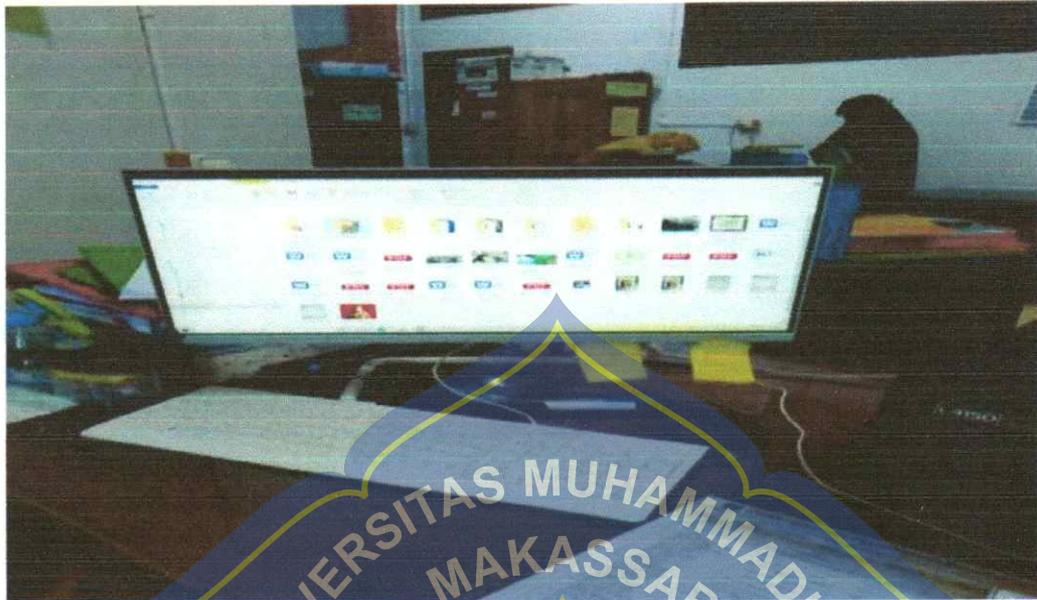
Wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Litbang Pangkep Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan.



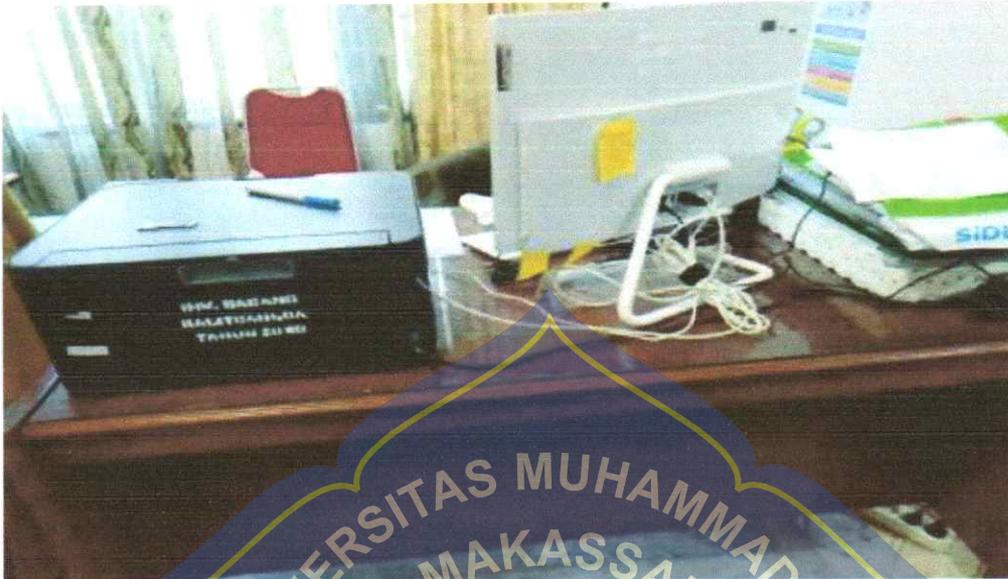
Wawancara dengan Sekertaris Bidang Aplikasi Litbang Pangkep Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan.













**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Nuhun Amalun No. 219, Telp. 08392272 Fax (0411) 6631504 Makassar 90221 E-mail: ip3m@umuh.ac.id



Nomor 607/05AC.4-VIII/140/2021
Tempat (satu) Rangkaian Proposal
Tentang Pemohonan dan Penelitian

23 Jumadil awal 1442 H
07 January 2021 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Bupati Pangkep
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Lulus
di -
Pangkep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0015/SP/PA I-VIII/XII/42/2020 tanggal 6 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama **FIRKAWATI**
No. Stambul **108611115616**
Fakultas **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Penerapan E-Government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2021 s.d 11 Maret 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut dibenarkan untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terimakasih dan harapan yang baik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua IP3M

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 08 Januari 2021

K e p a d a,

Nomor : 070/00 /A/KKBP/2021
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth Kepala DPM-PTSP
 Kab. Pangkep
 Di-

Pangkajene

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/00 /A/KKBP/2021

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengisian Rekomendasi Penelitian Penelitian Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Memperhatikan Surat Ketua LP3M Nomor 001/2015/LP3M/001/40/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada

- a. Nama : **FIRKAWATI**
 b. No. Stambuk : **10561-1118616**
 c. Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 d. Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 e. Pekerjaan : **Mahasiswa**

bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul

" PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE "

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANIBAPATI
 KEPALA KANTOR

AMIRUDDIN A. MADJID, S.Sos
 Pembina-IV/a
 196603071987011014

TEMBUSAN Kepada Yth
 1. Bupati Pangkep di Pangkajene;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 012/PT/DPMPTSPA/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep;
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian sebagai berikut:

Nama : FIRAWATI
 Nomor : 10561115516
 Tempat dan Tanggal Lahir : BARONG, 15.08.1994
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : Kalung Kel. Desa Bonto Birak Kab. Tondong Tallo, Kab. Pangkajene dan Kepulauan
 Tempat Mendaftar : BALTANGGA

Maksud dan Tujuan: Melakukan penelitian tentang rangka perluasan akses dengan judul "Penerapan e-Government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep" Lamanya Penelitian: 15 Januari 2021 s.d 18 Maret 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merahasiakan tujuan studi dan informasi yang berlaku, serta menjamin tidak terjadi kebocoran;
2. Penelitian tidak menyebarkan data, informasi yang diberikan;
3. Menyerahkan 1 (satu) set data foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Surat izin Penelitian ini diwajibkan untuk dipergunakan oleh pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
 Pangkajene, 18 Januari 2021



- Femilasan Kopasid 1/11
1. Kepala Bupati Pangkep (Gebogel Laporan);
 2. Kepala Kantor Kesbang;
 3. Arsip;



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. Bachtiar, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19760930 199511 1 001



RIWAYAT HIDUP



FIRKAWATI, lahir pada 15 Juni 1998 di Barone Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Putri Ketiga dari pasangan Muh. Amir dan Ibu Bondeng.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari sekolah dasar SDN 21 Birao pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Makassar pada tahun 2012, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Yapendik Makassar pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2021, penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul skripsi "*E-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep". Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.